

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi masyarakat (ormas) yang berdiri pada tahun 1912. Organisasi yang bercorak keagamaan ini didirikan oleh seorang ulama bernama Muhammad Darwis kemudian berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Sebagai organisasi yang bercorak keagamaan, sumber nilai yang dijadikan rujukan oleh organisasi perserikatan Muhammadiyah adalah sumber primer dari ajaran agama Islam yaitu kitab suci Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah juga merupakan organisasi keagamaan yang dikenal bercorak modernis, oleh karena itu, Muhammadiyah ikut terlibat dalam agenda pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia.¹

Salah satu amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan adalah pondok pesantren. Kemunculan pondok pesantren Muhammadiyah secara resmi dimulai pada tahun 1960-an, khususnya setelah muktamar memutuskan pentingnya pendidikan calon ulama karena kurangnya ulama waktu itu, khususnya di kalangan Muhammadiyah. Kemudian, berdasarkan hasil muktamar ke-39 tahun 1974 di Padang yang dilanjutkan pada sidang Tanwir di Yogyakarta, menetapkan bahwa ada 7 pondok pesantren Muhammadiyah di Indonesia yang menjadi pelopor pada masa-masa awal didirikannya pondok pesantren Muhammadiyah, yaitu pesantren berbasis Madrasah

¹ M. Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 41.

Muallimin Yogyakarta (1918/1932), pesantren berbasis Madrasah Muallimat Yogyakarta (1918/1932), Pesantren Muhammadiyah Karang Asem Lamongan Jawa Timur (1948), Pesantren Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan Sipirok Sumatera Utara (1962), Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) Yogyakarta (1968), Pesantren Muhammadiyah Gombara Sulawesi Selatan (1971), dan Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam, Garut, Jawa Barat (1976).²

Tradisi di dalam Muhammadiyah yang awalnya hanya mendirikan sekolah-sekolah Islam atau madrasah, kemudian setelah muktamar Muhammadiyah tahun 1960-an akhirnya memutuskan untuk membangun sebuah lembaga pendidikan Islam berupa pesantren sebagai bentuk pendidikan kader ulama.³

Berdasarkan keterangan di atas, salah satu sekolah Muhammadiyah yang menerapkan sistem pondok pesantren sebagai bentuk pendidikan kader ulama adalah Pondok Pesantren Muhammadiyah Gombara, Sulawesi Selatan. Pondok pesantren tersebut merupakan satu-satunya pondok pesantren Muhammadiyah pertama untuk wilayah Indonesia Timur yang didirikan oleh seorang ulama dari Latoang Salo, Rappang, Sidrap, bernama Kiai Abdul Djabbar Ashiry Thalib. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pendirian pesantren tersebut yaitu pada tahun 1974,⁴ dan ada juga

² Ichwansyah Tampubulon, “Trilogi Sistem Pendidikan Pesantren Muhammadiyah. Suatu Pengantar”, *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 1 No. 2, (2019), 121.

³ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986), 94–96.

⁴ Nursyamsiah, Ernarningsih, “Abdul Djabbar Ashiry Thalib : Perintis Pesantren Darul Arqam” dalam *Ulama Perintis : Biografi Mini Ulama Sul-sel*. Editor : Waspada. (Yogyakarta-Makassar : Pustaka Al-Zikra, 2010), 83.

yang menyebutkan pada tahun 1971.⁵ Adapun sumber yang paling meyakinkan adalah tahun 1971 bersamaan dengan terpilihnya Kiai Abdul Djabbar Ashiry sebagai Ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan periode 1971-1975.⁶

Titik awal didirikanya Pondok Pesantren Muhammadiyah Gombara dimulai dari keputusan Pimpinan Muhammadiyah daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara pada tahun 1963 (saat Haji Quraish Djailani menjadi ketua) untuk membina pendidikan kader ulama. Dalam rencana tersebut, Kiai Abdul Djabbar Ashiry diamanahkan untuk menjabat sebagai ketua panitia. Rencana sebelumnya terkait lokasi penempatan dari pendidikan kader ulama tersebut adalah di Cabang Bantaeng dan Cabang Rappang. Namun karena mengalami beberapa kendala seperti kekurangan guru pembina dan dana, lokasi dari pelaksanaan pendidikan kader ulama dipindahkan di Makassar dan berlangsung beberapa tahun.⁷

Berbagai dinamika mewarnai fase awal program Pendidikan Kader Ulama Muhammadiyah di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Meskipun sempat mengalami penundaan selama beberapa tahun, berkat kerja keras dan kesungguhan Kiai Djabbar Ashiry bersama sejumlah sejawatnya, yakni KH Fathul Mu'min Daeng Ma'gading, Dr. S. Madjidi, dan KH Marzuki Hasan, program Pendidikan Kader Ulama Muhammadiyah akhirnya dapat dilanjutkan. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan

⁵ Informasi dapat diakses melalui <https://gombara.com/sejarah-pondok/>

⁶ Mustari Bosra,dkk, *Menapak Jejak Menata Langkah : Sejarah Gerakan dan Biografi Ketua-Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), hlm 133-144.

⁷ Mustari dkk, *Menapak Jejak Menata Langkah*, 138.

berdirinya Pondok Pesantren Muhammadiyah Gombara pada tahun 1971 di wilayah Gombara–Bulurokeng.⁸

Dalam perjalanan sejarah Pondok Pesantren Muhammadiyah Gombara, jumlah santri angkatan pertama tercatat sebanyak 10 orang dan seluruhnya merupakan santri putra. Namun, dalam perkembangannya, khususnya pada dekade 1980-an, pesantren tersebut pernah membina lebih dari seribu santri putra dan putri. Pondok Pesantren Muhammadiyah Gombara juga telah melahirkan sejumlah alumni yang berhasil berkiprah di berbagai bidang. Beberapa di antaranya ialah Shamsi Ali, yang pernah menjabat sebagai Imam Besar di Kota New York, Amerika Serikat, serta Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora.⁹

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok persoalan yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah *Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah Pertama di Indonesia Timur*, Adapun pertanyaan penelitian yang dapat diajukan yaitu:

1. Mengapa pesantren dipilih menjadi bentuk lembaga pendidikan kader ulama Muhammadiyah dan bukan madrasah di Sulawesi Selatan? Padahal sejauh ini diketahui bahwa Muhammadiyah tidak mendirikan pesantren.

⁸ Mustari dkk, *Menapak Jejak Menata Langkah*, 141.

⁹ Informasi dapat diakses melalui <https://gombara.com/sejarah-pondok/>

2. Mengapa terjadi perubahan yang cukup drastis pada kurikulum Pondok Pesantren Muhammadiyah Gombara dalam periode 1971-1981?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penulisan sejarah ada baiknya dibatasi agar pembahasan tidak meluas dan hanya terfokus pada terfokus pada objek yang akan ditulis karena itu, batasan sangat penting untuk itu dalam penulisan sejarah terbagi menjadi dua yaitu batasan spasial yang membatasi mengenai tempat atau wilayah yang akan dikaji dan batasan temporal yang membatasi mengenai waktu yang akan ditulis.

1.3.1 Batasan spasial

Dalam batasan spasial penulis mengambil wilayah Makassar Kec. Biringkanaya, tempat berdirinya Pondok Pesantren Muhammadiyah Gombara.

1.3.2 Batasan temporal

Pada batasan temporal penulis mengambil tahun 1971-1981. Alasan peneliti mengambil periode 10 tahun pertama untuk mengetahui dinamika awal dari berdirinya Pondok Pesantren Muhammadiyah Gombara sebagai Lembaga Pendidikan Kader Ulama Muhammadiyah Sulawesi Selatan beserta sistem pendidikan yang diterapkan pada periode tersebut.

1.4 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan mengapa pesantren dipilih menjadi bentuk Lembaga Pendidikan kader ulama dan bukan madrasah.

2. Untuk mengetahui perubahan kurikulum yang terjadi di Pondok Pesantren Muhammadiyah Gombara pada periode 1971-1981.

1.5 Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur Sejarah mengenai pondok pesantren Muhammadiyah pertama yang ada di Indonesia Timur. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan mengenai pondok pesantren Muhammadiyah Pertama di Indonesia Timur dan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya. Dan juga dapat menambah eksistensi Pesantren Muhammadiyah Gombara Makassar dalam dunia pendidikan melalui pengetahuan sejarah dalam penelitian ini.

1.6 Tinjauan pustaka

1.6.1 Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut merupakan berbagai penelitian yang dianggap relevan dengan topik penulis:

Zamakhsyari Dhofier dalam bukunya yang berjudul *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* menjelaskan struktur sosial pesantren, peran sentral kiai, serta tradisi keilmuan yang menjadi fondasi kelembagaan pesantren di Indonesia.¹⁰

Azyumardi Azra dalam bukunya yang berjudul *Pendidikan Islam: Tradisi dan*

¹⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1982).

Modernisasi Menuju Milenium Baru menguraikan dinamika pendidikan Islam dalam konteks modernisasi dan kebijakan negara, termasuk transformasi pesantren pada masa Orde Baru.¹¹

Deliar Noer melalui karyanya *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942* menempatkan Muhammadiyah sebagai gerakan modernis yang menekankan pembaruan pendidikan dan pemurnian ajaran Islam.¹²

Haedar Nashir dalam bukunya *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan* menjelaskan perkembangan Muhammadiyah sebagai gerakan sosial-keagamaan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan kebijakan pendidikan nasional.¹³

Hamdan Haris dalam skripsinya yang berjudul *Patronase dan Afiliasi Santri dalam Partai Politik di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Makassar*, mengkaji hubungan antara pesantren dan dinamika politik, khususnya mengenai pola patronase dan afiliasi santri terhadap partai politik. Kajian ini berfokus pada aspek sosial-politik dan relasi kekuasaan di lingkungan pesantren.¹⁴

Andi Wahyuni melalui skripsinya yang berjudul *Kultur Pesantren dalam Pembinaan Karakter Santri di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Makassar*, meneliti aspek kultur pesantren dalam pembentukan karakter

¹¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos, 1999).

¹² Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942* (Jakarta: LP3ES, 1980).

¹³ Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010).

¹⁴ Hamdan Haris, *Patronase dan Afiliasi Santri dalam Partai Politik di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Makassar* (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018).

santri. Penelitian tersebut menekankan pada proses internalisasi nilai-nilai keislaman dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari santri dengan pendekatan pendidikan dan sosiologis.¹⁵

Nur Ainil Fadhillah dalam skripsinya yang berjudul *Peranan Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Makassar (dalam Menanamkan Budaya Islam terhadap Santri)*, membahas peran pesantren dalam menanamkan budaya Islam kepada santri. Penelitian ini berorientasi pada fungsi pendidikan dan pembinaan nilai dalam lingkungan pesantren.¹⁶

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek sosial, budaya, pendidikan, dan politik pesantren, serta dinamika Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan Islam. Namun demikian, kajian yang secara khusus merekonstruksi sejarah berdirinya dan perkembangan awal Pondok Pesantren Muhammadiyah Gombara pada periode 1971–1981 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, skripsi ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan historis dengan menempatkan pesantren dalam konteks dinamika pendidikan Islam dan kebijakan nasional pada masa Orde Baru. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian sebelumnya, tetapi juga memperkaya historiografi pendidikan Islam di Indonesia Timur.

¹⁵ Andi Wahyuni, *Kultur Pesantren dalam Pembinaan Karakter Santri di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Makassar* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

¹⁶ Nur Ainil Fadhillah, *Peranan Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Makassar (Dalam Menanamkan Budaya Islam terhadap Santri)* (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021).

1.6.2 Landasan konseptual

a) Pengertian pesantren

Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan dengan bentuk khas sebagai tempat dimana proses perkembangan keilmuan, keterampilan para santri menjadi sebuah tujuan utama, dan moral.¹⁷ Istilah Pondok Pesantren ialah dua gabungan antara kata yang memiliki satu arti, yaitu kata “pondok” dan “pesantren”. Pondok dapat diartikan sebagai tempat tinggal yang biasanya terbuat dari bambu, sedangkan pesantren dapat diartikan sebagai sekolah Islam yang memiliki pondok atau asrama. Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama umumnya dengan cara nonklasikal dimana seorang ustadz mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama abad pertengahan, dan para santri umumnya tinggal dipondok pesantren.¹⁸

Menurut M. Arifin, Pondok Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar dengan sistem asrama. Para santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan kepemimpinan seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal

¹⁷ Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren dan Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), 17.

¹⁸ Babun Suharto, *Dari Pesantren untuk Umat Reinventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi*, (Surabaya: Imtiyaz, 2011), 10.

apapun.¹⁹ Kemudian lembaga *Research* Islam mendefinisikan pondok pesantren yaitu suatu tempat yang tersedia untuk para santri dalam menerima pelajaran agama Islam sekaligus sebagai tempat tinggal dan tempat berkumpulnya para santri.²⁰

Pengertian pondok pesantren menurut para ahli:

1. Zamakhsyari Dhofier, pesantren ditopang oleh lima elemen pokok, yaitu kiai, santri, masjid, pondok (asrama), serta pengajaran kitab-kitab Islam klasik (kitab kuning).²¹
2. Ridlwan Nasir menegaskan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam berasrama yang menempatkan kiai sebagai figur sentral dalam proses pembelajaran dan pembinaan moral santri.²²
3. Mastuhu memandang pesantren sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya mentransmisikan ilmu keislaman, tetapi juga membentuk kepribadian, kemandirian, serta akhlak santri melalui kehidupan kolektif yang terstruktur.²³

Mujamil Qomar, menyatakan bahwa pondok pesantren memiliki persepsi yang plural. Pondok pesantren dapat dipandang sebagai lembaga ritual, lembaga pembinaan

¹⁹ Achmad Patoni, *Peran Kyai Pesantren Dalam Partai Politik* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2003), 87.

²⁰ Research Islam (Pondok Pesantren Luhur), *Sejarah dan Dakwah Islamiyah Sunan Giri* (Malang: Panitia Penelitian dan Pemugaran Sunan GiriGersik, 1975), 45.

²¹ Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 44–60.

²² Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 80–85.

²³ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), 55–60.

moral, sebagai lembaga dakwah, dan yang paling populer adalah sebagai institusi pendidikan Islam yang mengalami proses romantika kehidupan dalam menghadapi berbagai hal tantangan internal maupun eksternal.²⁴

Penting untuk ditambahkan bahwa pondok pesantren dan juga madrasah memiliki perjalanan sejarah yang tidak terlalu berbeda. Meskipun kedua instansi pendidikan tersebut masing-masing berdiri secara independen saat ini, namun keduanya memiliki visi pengembangan pendidikan Islam yang tidak jauh berbeda dan juga keduanya sangat identik dalam hal operasional pendidikannya. Istilah madrasah, berasal dari bahasa Arab yang berarti sekolah. Secara etimologis, kata madrasah berasal dari akar kata *darasa* yang berarti tempat duduk untuk belajar. Jika mengacu pada definisi di atas, maka secara definitif, pondok pesantren tidaklah berbeda dengan madrasah, sehingga madrasah juga sering disebut sebagai sekolah agama.²⁵

Menurut Ihsan, saat Indonesia di fase pra-kemerdekaan, madrasah dan pesantren menyatu. Keduanya masih sama-sama berfokus pada ilmu-ilmu agama yang bersumber dari kitab klasik bahkan mengharamkan ilmu-ilmu umum. Setelah memasuki fase awal kemerdekaan sampai 1960-an, madrasah sudah mulai ada yang berdiri sendiri di luar pesantren. Ilmu-ilmu umum tidak lagi diharamkan secara mutlak, dan mulai diadopsi dalam jumlah yang terbatas. Saat memasuki era 1960-an sampai

²⁴ Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2005), 2.

²⁵ Ihsan, *Madrasah Berbasis Pesantren : Sebuah Model Pergulatan Pendidikan Islam di Madrasah Aliyah*. (Yogyakarta : LKiS 2020), 52.

1975, madrasah semakin banyak yang berdiri sendiri di luar pesantren, adapun komposisi pelajarannya 60% Pelajaran agama dan 40% pelajaran umum, hingga terbit SKB tiga menteri tahun 1975 yang memutuskan madrasah telah berdiri sendiri dan mengadopsi sistem persekolahan secara penuh. Adapun komposisi pelajarannya berubah menjadi 40% pelajaran agama dan 60% pelajaran umum²⁶.

b) Tujuan Pesantren

Keberadaan pesantren memberikan kontribusi yang signifikan, khususnya dalam pengembangan ajaran Islam. Melalui sistem pendidikan yang diterapkan, pesantren memungkinkan santri untuk mendalami berbagai cabang ilmu keislaman, seperti ilmu tauhid, tafsir, hadis, tasawuf, dan bahasa Arab. Dalam konteks ini, para santri diharapkan mampu mempelajari ilmu-ilmu tersebut secara menyeluruh sehingga ketika menyelesaikan pendidikan, mereka telah menguasai berbagai disiplin ilmu agama. Pada dasarnya, setiap pesantren bertujuan membentuk manusia yang dalam kehidupannya berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., berakhlak mulia dalam pergaulan, bermanfaat bagi sesama, bangsa, dan negara, teguh dalam pendirian, serta mampu berdakwah di tengah masyarakat. Dengan demikian, pesantren berupaya melahirkan insan yang baik di hadapan Allah Swt. maupun dalam kehidupan sosialnya.²⁷

²⁶ Ihsan, *Madrasah Berbasis Pesantren*, 56.

²⁷ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), 22.

Pesantren juga memberi harapan kepada para santri agar menjadi manusia yang memiliki kepribadian Islam dengan mengamalkan ilmu agamanya dan menjadi mubalig Islam untuk masyarakat sekitar. Pada dasarnya segala sesuatu itu tentu membutuhkan usaha dan setiap usaha itu mempunyai tujuan yang ingin dicapai, tanpa tujuan jeripayah tidak akan berarti.²⁸

c) Pesantren Muhammadiyah

Pesantren Muhammadiyah merupakan lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang berafiliasi dengan serta dikelola secara resmi oleh perserikatan Muhammadiyah sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku. Di samping itu, terdapat pula pesantren yang beridentitas Muhammadiyah namun didirikan dan dikelola oleh tokoh, ahli waris tokoh kharismatik Muhammadiyah, atau oleh anggota dan simpatisan Muhammadiyah. Meskipun demikian, pesantren-pesantren tersebut tetap merujuk pada nilai, manhaj, dan prinsip gerakan Muhammadiyah dalam penyelenggaraan pendidikannya.²⁹

Pesantren Muhammadiyah memiliki tujuan yang bersifat internal dan eksternal. Secara internal, pesantren bertujuan memenuhi kebutuhan umat sekaligus menjamin ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang keislaman, keilmuan, dan kejuangan, khususnya dalam aspek dakwah, tarjih, kaderisasi, serta regenerasi kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah. Secara

²⁸ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, 24-25.

²⁹ Tampubolon, "Trilogi Sistem Pendidikan Pesantren Muhammadiyah", 117.

eksternal, pesantren Muhammadiyah berupaya melahirkan alumni yang mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan umat, bangsa, dan negara, serta berkontribusi terhadap kepentingan kemanusiaan global sesuai dengan dinamika perkembangan zaman.³⁰

Sebagai lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan tertentu, pesantren Muhammadiyah memiliki ciri dan karakter yang tidak terlepas dari corak pemikiran dan praktik keagamaan Muhammadiyah. Sebagai organisasi Islam yang mengusung jargon *Islam Berkemajuan*, Muhammadiyah memberikan warna dan arah ideologis bagi pesantren-pesantren yang berada di bawah naungannya. Corak tersebut menjadi pembeda utama antara pesantren Muhammadiyah dan pesantren lainnya, baik dalam aspek kurikulum, sistem pendidikan, maupun orientasi gerakan dakwahnya.³¹

Ichwansyah Tampubulon, mengklasifikasi bahwa secara umum ada 3 tipologi corak pesantren yang berkembang di Indonesia, yaitu moderat-akomodatif, konservatif-fundamentalistik, dan alternatif-progresif. Corak pesantren moderat-akomodatif diidentikkan dengan pesantren tradisional, kebanyakan pesantren jenis ini berafiliasi dengan organisasi keagamaan Nahdatul Ulama (NU), sedangkan corak pesantren konservatif-fundamentalistik berafiliasi dengan kelompok salafi-wahabi,

³⁰ Lembaga Pengembangan Pesantren (LP2) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Standar Pendidikan Pesantren Muhammadiyah Tahun 2017*, (Jakarta : PP Muhammadiyah 2017), 10-11.

³¹Tampubulon, “Trilogi Sistem Pendidikan Pesantren Muhammadiyah” 120.

dan pesantren Muhammadiyah dikategorikan sebagai pesantren yang bercorak alternatif-progresif.³²

Corak alternatif-progresif pada pesantren Muhammadiyah dapat dilihat dari sistem pendidikan yang diterapkan di pesantren tersebut, Adapun sistem pendidikan yang diterapkan pada pesantren Muhammadiyah ada tiga, yaitu sistem pendidikan madrasah, sistem pendidikan Islamic Boarding School dan sistem pendidikan takhassus.³³

Sistem pendidikan madrasah pada pesantren Muhammadiyah sering juga disebut dengan nomenklatur pondok pesantren modern Muhammadiyah. Penggunaan kata “modern” pada sistem madrasah ini menjadi penekanan bahwa sistem pendidikan pesantren yang disebut sistem madrasah berbeda dengan sistem pendidikan yang berlaku pada pesantren yang disebut sebagai pesantren “tradisional”.³⁴

Jika pada pesantren yang bercorak tradisional kurikulum pembelajaran didominasi oleh pelajaran-pelajaran keislaman semata, yang dilakukan biasanya dengan kitab-kitab tertentu yang disebut kitab kuning, maka pada pesantren Muhammadiyah yang menerapkan sistem madrasah, kurikulum pembelajaran yang digunakan adalah kurikulum yang bersifat integral, yaitu perpaduan antara ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu umum. Biasanya dalam kurikulum madrasah di pesantren Muhammadiyah ditambahkan materi-materi seputar kemuhammadiyaan, bahasa Arab

³²Tampubulon, “Trilogi Sistem Pendidikan Pesantren Muhammadiyah. 121.

³³Tampubulon, “Trilogi Sistem Pendidikan Pesantren Muhammadiyah, 124.

³⁴Tampubulon, “Trilogi Sistem Pendidikan Pesantren Muhammadiyah. 125.

dan Inggris, materi kaderisasi dan lain-lain. Pada pesantren Muhammadiyah sendiri sangat jarang ditemukan penggunaan kitab kuning sebagai rujukan pembelajaran.³⁵

Model pembelajaran yang bersifat integral dari pesantren Muhammadiyah sendiri sebenarnya dapat dilacak dari ide pembaharuan pendidikan Islam dari pendiri Muhammadiyah yang dipengaruhi oleh ulama Mesir, Muhammad Abduh.³⁶ Muhammad Abduh sendiri dalam gagasan pembaharuan pendidikannya sangat menolak sistem pendidikan yang dualisme, yaitu adanya instansi pendidikan yang hanya fokus pada bidang agama saja, sementara instansi pendidikan lain hanya fokus pada ilmu umum semata.³⁷

Adapun sistem pendidikan *Islamic boarding school* pada pesantren Muhammadiyah merupakan sekolah-sekolah Muhammadiyah tingkat menengah pertama dan menengah atas bahkan sejak tingkat sekolah dasar yang mengharuskan sebagian besar atau seluruh peserta didiknya bermukim di asrama sekolah dalam jangka waktu tertentu.³⁸

Terakhir adalah sistem pendidikan takhassus, sistem pendidikan takhassus pada pesantren Muhammadiyah merupakan sistem pendidikan tertentu yang diselenggarakan dengan kurikulum khusus yang disusun berdasarkan disiplin ilmu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pesantren atau kampus

³⁵ Tampubulon, "Trilogi Sistem Pendidikan Pesantren Muhammadiyah", 125.

³⁶ Kastolani, *Islam dan Modernitas : Sejarah Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia*. (Sleman : Trussmedia Group, 2019), 94.

³⁷ Kastolani, *Islam dan Modernitas*, 69.

³⁸ Tampubulon, "Trilogi Sistem Pendidikan Pesantren Muhammadiyah", 128.

Muhammadiyah tertentu. Contoh dalam hal ini adalah Perguruan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) yang menggunakan sistem pendidikan takhassus untuk mencetak calon-calon ulama di bidang tarjih khususnya di lingkungan Muhammadiyah.³⁹

Pesantren Muhammadiyah memiliki karakteristik yang membedakannya dari pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sama-sama berperan penting dalam pembinaan umat, termasuk di bidang pendidikan. Namun, perbedaan di antara keduanya dapat dilihat dari orientasi, metode, dan sistem pendidikan yang dikembangkan. Pesantren Muhammadiyah umumnya menerapkan sistem pendidikan yang terintegrasi, seperti sistem madrasah, boarding school, dan program takhassus, sehingga sering dikategorikan sebagai pesantren modern. Sementara itu, pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama lebih dikenal dengan model pesantren tradisional yang menekankan pengajaran kitab klasik (kitab kuning) melalui metode khas seperti sorogan dan bandongan, meskipun dalam perkembangannya juga mengalami berbagai bentuk pembaruan.⁴⁰

Sistem dari pesantren Nahdhatul Ulama dapat diidentifikasi melalui kurikulum dan metode pengajarannya. Kurikulum pesantren NU cenderung memfokuskan kepada kurikulum keagamaan melalui pelajaran kitab kuning atau kitab tradisional berbahasa

³⁹ Tampubolon, "Trilogi Sistem Pendidikan Pesantren Muhammadiyah", 132.

⁴⁰ Indah Wahyuliani dkk, "Konsep Lembaga Pendidikan di Pesantren Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama", *Tsaqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol 4. No 2, (2022), 123.

Arab lainnya seperti ilmu fiqh, Ilmu Al-Qur'an, Ilmu tasawwuf dan sebagainya. Adapun metode pengajaran yang digunakan dalam pesantren NU yaitu sorogan, wetonan, muhawarah, mudzakah.⁴¹

Sorogan adalah metode yang dilakukan santri dengan cara mengunjungi langsung kiai atau ustad untuk dibimbing secara individu dalam mempelajari kitab-kitab keagamaan tertentu. Metode wetonan merupakan kelanjutan dari metode sorogan, bahwa santri yang telah rutin dibimbing secara individu oleh kiai atau ustad harus mampu mengaplikasikan ilmunya tersebut pada masyarakat. Metode muhawarah merupakan metode bimbingan dalam bentuk dialog berbahasa Arab dengan tujuan melatih kemampuan santri dalam berpidato. Dan metode mudzakah merupakan bimbingan belajar dalam bentuk pertemuan rutin untuk membahas persoalan keagamaan dan juga persoalan terkini.⁴²

1.7 Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah sebagaimana dikemukakan oleh Kuntowijoyo, yang memandang sejarah sebagai rekonstruksi masa lalu secara ilmiah melalui proses pemilihan fakta, penafsiran, dan penjelasan yang rasional.⁴³ Metode sejarah tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga menekankan

⁴¹ Wahyuliani dkk, "Konsep Lembaga Pendidikan di Pesantren Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama", 125.

⁴² Wahyuliani dkk, "Konsep Lembaga Pendidikan di Pesantren Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama", 125-126.

⁴³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 18-19.

pentingnya analisis kritis terhadap sumber-sumber sejarah serta penulisan sejarah yang bertanggung jawab secara akademik.⁴⁴

Dalam penelitian ini, metode sejarah diterapkan melalui beberapa tahapan kerja yang saling berkaitan, yaitu pengumpulan sumber, kritik sumber, analisis dan interpretasi data, serta penulisan sejarah secara kronologis dan tematis.

1) Pengumpulan sumber sejarah

Pengumpulan sumber dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dengan topik penelitian, yaitu sejarah perkembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah Gombara pada periode 1971-1981. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer meliputi arsip pesantren, surat keputusan, dokumen internal lembaga, foto-foto lama, serta hasil wawancara dengan tokoh pendiri, pengelola, guru, dan alumni Pondok Pesantren Muhammadiyah Gombara. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali pengalaman, pandangan, dan kasaksian langsung para pelaku sejarah yang terlibat dalam pendirian dan perkembangan pesantren.

Sumber sekunder berupa buku, skripsi, jurnal ilmiah, serta karya ilmiah lain yang membahas sejarah pendidikan Islam, pesantren Muhammadiyah, kebijakan pendidikan nasional, dan kondisi sosial-politik Indonesia pada masa penelitian. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan kerangka konseptual dalam memahami data primer.

⁴⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 22-23.

2) Kritik sumber

Setelah sumber-sumber terkumpul, dilakukan kritik sumber untuk menilai keabsahan dan kredibilitas data sejarah. Kritik sumber bertujuan untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan relevan dengan objek penelitian.

Kritik dilakukan dengan menilai latar belakang penulis atau narasumber, waktu dan konteks penulisan sumber, konsistensi isi, serta kemungkinan adanya bias kepentingan. Perbandingan antar sumber dilakukan guna menghindari kesalahan fakta, terutama dalam penggunaan sumber lisan yang bersifat subjektif.

3) Analisis dan interpretasi data

Tahap analisis dan interpretasi merupakan proses penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah melalui kritik sumber. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis untuk menemukan hubungan sebab-akibat, pola perkembangan, serta dinamika sosial, pendidikan, dan kelembagaan yang terjadi di Pondok Pesantren Muhammadiyah Gombara.

Dalam tahap ini, fakta sejarah tidak dipahami sebagai data yang berdiri sendiri, melainkan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, seperti kebijakan pendidikan nasional, dinamika internal Muhammadiyah, serta perkembangan pesantren di Indonesia. Penafsiran dilakukan secara rasional dan objektif agar menghasilkan pemahaman sejarah yang komprehensif dan analitis.

4) Penulisan Sejarah

Tahap akhir dari penelitian ini adalah penulisan sejarah berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data. Penulisan dilakukan secara kronologis dan tematis, dengan memperhatikan kesinambungan peristiwa serta perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

Penulisan sejarah dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan merekam peristiwa masa lalu, tetapi juga menjelaskan makna dan signifikansi perkembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah Gombara sebagai lembaga pendidikan Islam dan kaderisasi ulama Muhammadiyah di Indonesia Timur pada periode 1971-1981.

1.8 Sistematika penulisan

Untuk memberi gambaran yang utuh dan jelas, serta mencapai hasil yang maksimal, maka perlu perencanaan yang benar benar matang. Perencanaan ini terwujud antara lain dengan mensistematiskan antara satu bab dengan bab yang lain agar memiliki keterkaitan secara sistematis dan logis. Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika menjadi lima bab yaitu sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian mengenai sejarah berdirinya dan perkembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah Gombara sebagai pesantren Muhammadiyah pertama di Indonesia Timur. Bab ini juga memuat rumusan masalah, batasan dan fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian sejarah, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Sistem Pendidikan di Indonesia

Bab ini membahas sistem pendidikan di Indonesia sebagai konteks historis bagi lahirnya Pondok Pesantren Muhammadiyah Gombara. Uraian meliputi perkembangan sistem pendidikan nasional, kebijakan pendidikan pemerintah terhadap pendidikan Islam, posisi dan peran pesantren dalam sistem pendidikan Indonesia, serta dinamika pendidikan Islam pada masa sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan pendidikan nasional. Pembahasan dalam bab ini bertujuan memberikan gambaran umum tentang latar belakang struktural dan kebijakan pendidikan yang memengaruhi berdirinya pesantren Muhammadiyah.

BAB III: Berdirinya Pondok Pesantren Muhammadiyah Gombara (1971-1974)

Bab ini membahas proses berdirinya Pondok Pesantren Muhammadiyah Gombara sejak perintisan hingga awal operasionalnya pada periode 1971-1974. Pembahasan meliputi latar belakang pendirian pesantren, peran tokoh-tokoh Muhammadiyah, proses perencanaan dan pembangunan, sistem pendidikan awal yang diterapkan, serta berbagai tantangan yang dihadapi pada masa awal pendirian pesantren.

BAB IV: Perkembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah Gombara (1975-1981)

Bab ini mengkaji perkembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah Gombara pada periode 1975-1981. Pembahasan mencakup perkembangan kurikulum dan sistem pendidikan, perubahan dan penguatan kelembagaan, perkembangan jumlah santri dan tenaga pendidik, peningkatan sarana dan prasarana, serta dampak kebijakan pendidikan

nasional termasuk SKB 3 Menteri terhadap arah dan dinamika perkembangan pesantren.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan, serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sejarah pendidikan Islam dan pesantren Muhammadiyah di Indonesia.

BAB II

Sistem Pendidikan di Indonesia

2.1 Perkembangan Pendidikan umum di Indonesia

2.1.1 Pendidikan Umum di Masa Kolonial

Pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dari masa ke masa, tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni sosial, politik, dan budaya yang ada pada setiap periode. Pendidikan pada masa kolonial (Hindia Belanda) berlangsung pada abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-20, didasarkan pada kebijakan yang sangat diskriminatif dan terbatas. Pada masa penjajahan, pendidikan Indonesia lebih di arahkan untuk mempertahankan kekuasaan kolonial, dengan sistem yang diskriminatif terhadap rakyat pribumi. Hanya golongan tertentu yang diberikan akses pendidikan formal, sementara mayoritas rakyat Indonesia tidak memperoleh kesempatan yang layak untuk mengakses pendidikan.⁴⁵

Pendidikan yang diberikan kepada orang Eropa sangat berbeda dengan pendidikan yang diterima oleh orang pribumi. Pendidikan untuk orang Eropa megadopsi sistem pendidikan Barat yang mengajarkan pengetahuan akademik dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mendukung kegiatan administrasi kolonial. Sekolah-sekolah untuk orang Eropa didirikan di kota-kota besar, dengan bahasa pengantar utama adalah bahasa Belanda dan kurikulumnya berfokus pada mata pelajaran yang terkait dengan hukum politik dan ekonomi. Sedangkan, pendidikan

⁴⁵ Muhammad Idris dkk, “Evolusi Sistem Pendidikan di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan Pendidikan di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 2, (2024), 1496.

untuk pribumi sangat terbatas dan terpisah, hanya mencakup keterampilan dasar untuk mendukung ekonomi kolonial seperti pertanian, perkebunan, dan kerajinan tangan.⁴⁶

Pada masa kolonial salah satu tokoh pendidikan yang berpengaruh adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berupaya mengembangkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dengan mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922, dengan tujuan untuk memberikan pendidikan berbasis budaya lokal untuk semua kalangan masyarakat, tanpa terkecuali. Dia mengedepankan pendidikan berbasis budaya lokal dan pembentukan karakter bangsa, yang bertujuan untuk menanamkan semangat kebangsaan dan mencetak generasi yang memiliki kesadaran akan kemerdekaan Indonesia. Konsep pendidikan yang diterapkan Ki Hajar Dewantara menjadi dasar penting dalam pembentukan sistem pendidikan Indonesia pasca-kemerdekaan.⁴⁷

2.1.2 Pendidikan Umum di Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, sistem pendidikan mengalami perubahan besar. Pemerintah Indonesia berfokus pada pemerataan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang status sosial, status, suku, atau agama. Pendidikan di masa kemerdekaan ini berfokus pada pembentukan karakter bangsa dan memperkuat semangat kebangsaan melalui pendidikan. Disisi lain pendidikan juga digunakan sebagai alat untuk memperkuat ideologi nasionalisme yang tengah di bangun pasca-kemerdekaan.⁴⁸

⁴⁶ Idris dkk, “Evolusi Sistem Pendidikan di Indonesia”, 1499.

⁴⁷ Idris dkk, “Evolusi Sistem Pendidikan di Indonesia”, 1500.

⁴⁸ Idris dkk, “Evolusi Sistem Pendidikan di Indonesia”, 1496.

Pada masa awal kemedekaan, pemerintah berusaha untuk meratakan akses pendidikan melalui berbagai kebijakan dan program. Salah satu kebijakan penting tersebut adalah usaha untuk memperkuat pendidikan dasar. Berdasarkan prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Dan pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar yang layak. Selain itu, pada tahun 1950-an Undang-Undang Pendidikan No. 4 Tahun 1950 telah disahkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, dengan fokus pada pemerataan pendidikan dan pembentukan lembaga pendidikan yang lebih terstruktur. Hal ini diikuti dengan pembentukan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan pada tahun 1954 untuk mengorganisir pendidikan di Indonesia.

Pemerintah mulai Menyusun kebijakan untuk memberikan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, pada masa ini banyak kebijakan yang terbatas oleh sumber daya yang ada. Akhirnya kebijakan lebih banyak berfokus pada pembangunan pendidikan dasar dan menengah di wilayah yang sudah memiliki infrastruktur yang memadai, seperti di Pulau Jawa, Sumatra, dan Bali, Sementara di daerah lain, akses pendidikan masih sangat terbatas.⁴⁹

2.1.3 Pendidikan Umum pada Masa Orde Baru

Pada masa orde baru, pendidikan Indonesia mengalami transformasi besar yang di pengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat

⁴⁹ Idris dkk, "Evolusi Sistem Pendidikan di Indonesia", 1501.

pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas politik negara. Salah satu perubahan terbesar dalam sistem pendidikan Indonesia pada masa Orde Baru yaitu pengenalan kebijakan wajib belajar dan ekspansi pendidikan yang di mulai pada awal 1970-an. Pada tahun 1973, pemerintah Indonesia memunculkan kebijakan wajib belajar 6 tahun (program pendidikan dasar enam tahun) yang bertujuan untuk memastikan setiap anak Indonesia dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Pada tahun 1984, kebijakan ini diperluas menjadi wajib belajar Sembilan tahun, yang mencakup pendidikan dasar hingga tingkat menengah pertama (SMP) untuk meningkatkan tingkat buta huruf yang tinggi pada waktu itu. Kebijakan ini membawa dampak yang positif dalam memperluas akses pendidikan di Indonesia, meskipun menghadapi tantangan terkait dengan pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai, terutama di daerah luar Jawa.

50

Selama masa orde baru, jumlah sekolah dan universitas meningkat pesat diseluruh Indonesia. Pemerintah mendirikan ribuan sekolah baru dan universitas negeri untuk meningkatkan akses pendidikan di berbagai daerah. Namun, meskipun terjadi ekspansi yang besar dalam jumlah sekolah, kualitas pendidikan tetap menjadi tantangan besar. Ketidakmerataan kualitas pendidikan antara kota besar dan di pedesaan masih menjadi masalah yang signifikan. Di beberapa daerah terpencil, terutama diluar pulau Jawa, sekolah-sekolah sering kekurangan guru terlatih dan fasilitas yang memadai. Meskipun kebijakan wajib belajar berhasil meningkatkan

⁵⁰ Idris dkk, "Evolusi Sistem Pendidikan di Indonesia", 1501.

angka partisipasi pendidikan, kualitas pendidikan di beberapa daerah tetap tidak sebanding dengan kualitas pendidikan di kota-kota besar.⁵¹

2.1.4 Pendidikan Umum pada Masa Reformasi dan Pasca-Reformasi

Setelah jatuhnya orde baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami transformasi besar dalam sistem pendidikan. Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan peningkatan transparansi dan desentralisasi dalam berbagai sektor, terutama pendidikan. Sebelumnya kebijakan pendidikan sangat terpusat, dengan pemerintah pusat yang memiliki kendali penuh atas kebijakan dan kurikulum pendidikan. Namun, setelah reformasi, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberi otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal mereka, namun juga menimbulkan tantangan terkait standarisasi dan kesenjangan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.⁵²

Salah satu kebijakan penting pada masa reformasi adalah perubahan kurikulum yang bertujuan untuk menjawab tantangan baru dalam dunia pendidikan. Pada tahun 2006, Indonesia memperkenalkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang memberikan kebebasan lebih kepada sekolah untuk merancang kurikulum sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah mereka. (KTSP) merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan berbasis pada

⁵¹ Idris dkk, "Evolusi Sistem Pendidikan di Indonesia", 1502.

⁵² Idris dkk, "Evolusi Sistem Pendidikan di Indonesia", 1502.

kompetensi. Pada tahun 2013, Indonesia meluncurkan Kurikulum 2013 (K13) yang mengedepankan pendidikan karakter dan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis dan kreativitas. K13 juga menekankan pendekatan tematik integratif, yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih holistik dan relevan bagi siswa di era globalisasi.⁵³

2.2 Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia

2.2.1 Pendidikan Islam pada masa Penjajahan

Pada masa pemerintahan Belanda, pendidikan agama tidak diberikan di sekolah-sekolah negeri dengan alasan pemerintah bersikap netral untuk tidak mencampuri masalah pendidikan agama, karena pendidikan agama merupakan tanggung jawab keluarga, sehingga setiap usulan wakil-wakil rakyat pribumi di Volksraad agar memasukkan pelajaran agama Islam di perguruan umum selalu ditolak, dan yang dibolehkan hanya di sekolah-sekolah partikular (swasta) yang berdasarkan keagamaan. Selain itu pemerintah Belanda juga menerapkan control yang sangat ketat dan kaku dalam mengawasi pribumi. Kontrol yang ketat ini dijadikan alat politik untuk menghambat bahkan menghalang-halangi pelaksanaan pendidikan Islam, dengan membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut *Priesterraden*.⁵⁴

Ordonasi guru dikenal pada masa pemerintah Belanda dengan mengeluarkan peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada

⁵³ Idris dkk, "Evolusi Sistem Pendidikan di Indonesia", 1503.

⁵⁴ Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 90.

izinnya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah yang disebut Ordonasi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie*). Nurhayati Djamas dalam buku yang berjudul *Dinamika Pendidikan di Indonesia Pasca Kemerdekaan* menjelaskan bahwa Ordonasi guru ini merupakan bentuk kekhawatiran pemerintah Belanda terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam dan sikap terjung guru agama yang akan memperluas pengembangan agama Islam melalui pendidikan.⁵⁵

Selain itu, untuk lingkungan kehidupan agama Kristen di Indonesia yang selalu menghadapi reaksi dari rakyat, dan untuk menjaga sekolah umum yang kebanyakan muridnya beragama Islam, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang disebut netral agama. Seperti yang dinyatakan pada *Indische Staatsregeling* bahwa pendidikan umum adalah netral, yang berarti pengajaran diberikan dengan menghormati keyakinan masing-masing. Namun disekolah umum untuk kalangan pribumi, pada HIS dan MULO diberikan pelajaran agama Islam secara sukarela sekali dalam seminggu bagi murid-murid yang berminat atas persetujuan orang tuanya. Pemerintah Belanda sendiri yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi pribumi, membentuk dua lembaga yaitu, Departemen *van Onderwijst en Eerendinst* untuk mengawasi pengajaran agama di sekolah umum dan Departemen *van Binnenlandsche Zaken* untuk pendidikan Islam di lembaga pendidikan Islam. Kebijakan pemerintah kolonial yang memerjinalkan aspirasi dan kepentingan kalangan muslim menjadi cikal bakal terciptanya dualitas pengaturan negara terhadap berbagai masalah yang

⁵⁵ Masykurillah dkk, *Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia* (Lampung: CV AMY Publishing, 2022), 37.

berhubungan dengan kepentingan kalangan muslim.⁵⁶

Langkah perubahan melalui pendidikan pada akhirnya menjadi pilihan bagi umat Islam Indonesia untuk melakukan berbagai inovasi diberbagai bidang kehidupan dalam Islam. Akibat proses pendidikan yang diterima, bangsa Indonesia akhirnya berhasil bangkit dari masa terpuruk di segala bidang selama masa penjajahan. Kebangkitan tersebut meliputi perkembangan rasa kebangsaan hingga perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam. Pendidikan Islam pun mengalami pembaharuan. Hal ini tidak lepas dari keinginan para sarjana Indonesia untuk melakukan inovasi modern di dunia pendidikan Islam.

Proses modernisasi inovatif pendidikan di kalangan Islam ini terus berlangsung pada saat Jepang menjajah Indonesia. Pada tanggal 8 Juli 1945 berdirilah sekolah tinggi Islam di Jakarta. Jika ditinjau dari segi pendidikan zaman Jepang, umat Islam mempunyai kesempatan yang banyak untuk memajukan pendidikan Islam, sehingga tanpa disadari oleh Jepang sendiri bahwa umat Islam sudah cukup mempunyai potensi untuk maju dalam bidang pendidikan ataupun perlawanan kepada penjajah. Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang kemudian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pendidikan Dasar (*Kokomin Gakko*/Sekolah Rakyat), lama studi 6 tahun, (2) Pendidikan lanjutan, yang terdiri dari (*Shoto Chu Gakko*/Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan (*Koto Chu Gakko*/Sekolah Menengah Tinggi) yang dengan lama studi yang sama yaitu 3 tahun. (3) Pendidikan kejuruan, mencakup

⁵⁶ Nurhayati Djamas, *Dinamikan pendidikan di Indonesia Pasca Kemerdekaan* (Jakarta: RajaGrafindo, 2009), 178.

sekolah lanjutan yang bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, Teknik, dan pertanian. (4) Pendidikan tinggi.⁵⁷

2.2.2 Pendidikan Islam pada masa Orde Lama (Pasca Kemerdekaan)

Pendidikan Islam pada masa orde lama berada dalam situasi transisional yang dipengaruhi oleh kondisi politik nasional yang belum stabil sejak awal kemerdekaan. Pemerintah pada masa ini menetapkan sistem pendidikan ganda *dualistic education system*, antara pendidikan umum yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pendidikan agama yang berada di bawah Kementerian Agama.⁵⁸ Madrasah dan pesantren berkembang secara mandiri dengan basis masyarakat, namun belum memiliki posisi yang kuat dalam struktur pendidikan nasional. Hal ini terjadi karena pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan negara secara politis dibanding pengembangan sistem pendidikan yang terintegrasi.⁵⁹

Di sisi lain, pesantren dan madrasah menghadapi keterbatasan fasilitas, kurikulum yang belum distandarisasi, serta lemahnya legitimasi negara atas sistem pendidikan Islam. Pemerintah orde lama sebenarnya telah melakukan beberapa upaya pembenahan melalui regulasi, seperti penetapan standar pelajaran agama di sekolah umum, namun hal ini belum menyentuh modernisasi madrasah secara menyeluruh.

⁵⁷ Rohidin Wahab, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2004), 24.

⁵⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 2011), 45.

⁵⁹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 88.

Dukungan negara terhadap pendidikan Islam masih bersifat minimal dan cenderung administratif.⁶⁰

Kondisi ini berdampak langsung pada nasib siswa yang menempuh pendidikan di pesantren dan madrasah. Karena ijazah madrasah belum diakui secara nasional, lulusan lembaga pendidikan Islam mengalami hambatan structural untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama sekolah menengah negeri atau perguruan tinggi.⁶¹ Bagi siswa madrasah yang ingin melanjutkan pendidikan formal, pilihan mereka sangat terbatas. Mereka harus mengikuti ujian persamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, atau secara mandiri mendaftar ke sekolah umum dengan mengikuti tes masuk yang biasanya mensyaratkan penguasaan mata pelajaran umum yang tidak mereka pelajari secara memadai dalam kurikulum madrasah.⁶²

Sementara itu, bagi santri pesantren, situasinya lebih sulit karena pesantren tradisional pada masa orde lama tidak menerbitkan ijazah yang dapat dipakai untuk melanjutkan pendidikan formal. Santri yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan modern harus masuk kembali ke sekolah umum dari kelas yang lebih rendah, atau berpindah ke madrasah modern yang lebih terstruktur, dan ini merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu yang lebih panjang.⁶³ Hal ini menyebabkan banyak siswa pendidikan Islam hanya bertahan dalam lingkungan pesantren atau madrasah

⁶⁰ Mastuhu, *Dinamika Sistem pendidikan Pesantren*, 103.

⁶¹ Mastuhu, *Dinamika Sistem pendidikan Pesantren*, 103.

⁶² Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 71.

⁶³ Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*”, 52.

tanpa kesempatan luas untuk mobilitas sosial melalui akses pendidikan formal yang lebih tinggi.

Kondisi inilah yang memperkuat tuntutan masyarakat Islam terhadap negara agar memberikan pengakuan dan legalitas terhadap pendidikan Islam. Namun, dinamika politik orde lama seperti ketegangan antara kelompok nasionalis, Islam, dan komunis menjelang 1965 juga menyebabkan perumusan kebijakan pendidikan Islam tidak berjalan optimal. Fokus pemerintah beralih pada konsolidasi politik, sehingga madrasah tetap berada dalam posisi marginal dan belum mendapatkan pengakuan formal setara sekolah umum.⁶⁴ Keseluruhan situasi pada masa orde lama inilah yang menjadi akar dari tuntutan pembaruan pendidikan Islam pada periode orde baru, yang kemudian membuka jalan menuju lahirnya SKB 3 Menteri pada tahun 1975, yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dan ketidaksetaraan pendidikan Islam yang mengakar sejak era orde lama.⁶⁵

2.2.3 Pendidikan Islam pada masa Orde Baru

Perkembangan pendidikan Islam pada masa orde baru setahap demi setahap mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Diantaranya lembaga-lembaga pesantren mulai mendirikan madrasah dalam sistem pendidikannya. Dalam sistem ini jenjang-jenjang pendidikan terbagi menjadi Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Sistem madrasah ini mendorong perkembangan pesantren sehingga jumlahnya

⁶⁴ Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, 74.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Sejarah Madrasah di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Islam, 2004), 92.

meningkat pesat. Pada tahun 1958/1959 lahir Madrasah Wajib Belajar yang memiliki hak dan kewajiban seperti sekolah negeri. Selanjutnya, di tahun 1965, berdasarkan rumusan seminar Pondok Pesantren di Yogyakarta disepakati bahwa di pondok pesantren perlu dimasukkan pelajaran keterampilan seperti pertanian dan pertukangan.

66

Keadaan inilah yang mendorong tokoh-tokoh Islam menuntut agar madrasah dan pendidikan keagamaan dimasukkan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Reaksi terhadap sikap pemerintah yang mendiskriminasikan menjadi lebih keras dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972, yang kemudian diperkuat dengan Intruksi Presiden No. 15 tahun 1974. Kepres dan Inpres dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dari pendidikan nasional. Bahkan sebagian umat Islam memandang Kepres dan Inpres itu sebagai manuver untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah yang sejak zaman penjajahan telah diselenggarakan umat Islam.⁶⁷

Munculnya reaksi keras umat Islam disadari oleh pemerintah yang kemudian mengambil kebijakan untuk melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah. Untuk mengatasi kekhawatiran dan kecemasan umat Islam akan dihapuskannya sistem pendidikan madrasah sebagai kongkurensi Kepres dan Inpres di atas, maka pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri

⁶⁶ Heni Yuningsih, “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru”, *Jurnal Tarbiya*, Vol. 1 No. 1, (2015), 180.

⁶⁷ Yuningsih, “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru”, 183.

yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 1975.⁶⁸

2.2.4 Lahirnya SKB 3 Menteri Tahun 1975

Lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tahun 1975 merupakan respon pemerintah orde baru terhadap berbagai persoalan struktural yang telah lama dihadapi oleh madrasah dan pesantren sejak masa orde lama. Salah satu persoalan fundamental adalah tidak adanya kesetaraan antara madrasah dan sekolah umum, baik dari aspek kurikulum, pengakuan ijazah, maupun akses lulusan madrasah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketidak teraturan ini menyebabkan pendidikan Islam di pandang kurang mampu memenuhi kebutuhan pembangunan nasional yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia.⁶⁹

Sejak awal masa orde baru, pemerintah mengedepankan modernisasi sektor pendidikan untuk mendukung pembangunan nasional. Dalam konteks pendidikan Islam, modernisasi ini dipahami sebagai upaya untuk menyatukan kurikulum madrasah dengan sistem pendidikan nasional, tanpa menghapus identitas keagamaannya.⁷⁰ Pemerintah melihat bahwa dominasi mata pelajaran agama di madrasah menghambat kemampuan siswa dalam memenuhi standar kompetensi akademik nasional. Oleh karena itu diperlukan kebijakan khusus yang mampu menata ulang sistem pendidikan

⁶⁸ Yuningsih, “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru”, 184.

⁶⁹ Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, 131.

⁷⁰ Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, 95.

madrasah agar setara dengan sekolah umum.⁷¹

Melalui serangkaian diskusi kebijakan antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Dalam negeri, pemerintah merumuskan langkah strategis untuk menyelesaikan dualism pendidikan yang telah berlangsung sejak awal kemerdekaan. Upaya ini mencapai titik penting pada tahun 1975 ketika ketiga Menteri tersebut menandatangani SKB 3 Menteri.⁷² Kebijakan ini menjadi tonggak sejarah dalam integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. SKB 3 menteri memberikan legitimasi formal terhadap madrasah dan membuka peluang mobilitas akademik serta sosial bagi siswanya. Selain itu, madrasah mulai mendapat perhatian lebih dalam hal pembinaan, bantuan fasilitas dan peningkatan kualitas guru.⁷³

Dengan demikian, lahirnya SKB 3 Menteri dapat dipahami sebagai hasil dari perjalanan panjang pendidikan Islam di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya menjawab persoalan klasik kesenjangan pendidikan Islam, tetapi juga menjadi titik awal modernisasi dan penguatan madrasah sebagai lembaga pendidikan formal yang diakui negara.

SKB 3 Menteri Nomor 6 Tahun 1975 (Menteri Agama), Nomor 037/U/1975 (Menteri Pendidikan dan kebudayaan), dan Nomor 36 Tahun 1975 (Menteri Dalam Negeri) berisi beberapa pokok kebijakan penting, yaitu:

⁷¹ Muhammad Tholhah Hasan, *Membina Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 1997), 67.

⁷² Tholhah, *Membina Pendidikan Islam di Indonesia*, 72.

⁷³ Departemen Agama RI, *Sejarah Madrasah di Indonesia*, 92.

1. Keseimbangan Kurikulum

Kurikulum madrasah diatur agar 60% berisi pelajaran umum dan 40% pelajaran agama. Hal ini bertujuan agar lulusan madrasah memiliki kemampuan akademik setara dengan lulusan sekolah umum.

2. Penyetaraan Ijazah dan Status Madrasah

Ijazah madrasah dapat diakui setara dengan ijazah sekolah umum yang setingkat, sehingga lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah negeri atau universitas tanpa hambatan administratif.

3. Koordinasi dan Pengawasan

Pengelolaan madrasah tetap berada di bawah Departemen Agama, tetapi dalam pelaksanaan kurikulum umum dilakukan koordinasi dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

Departemen Dalam Negeri turut serta dalam pembinaan pendidikan madrasah di daerah agar kebijakan pusat dapat diterapkan secara efektif.

SKB ini menegaskan pengakuan pemerintah terhadap peran strategis madrasah dan pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, SKB 3 Menteri ini menjadi dasar hukum pertama yang memberikan legitimasi terhadap posisi madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.⁷⁴

Lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tahun 1975 antara

⁷⁴ Mastuhu, *Dinamisasi Sistem Pendidikan Pesantren*, 87.

Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri merupakan tonggak penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. SKB ini menandai awal dari penyetaraan madrasah dengan sekolah umum, sehingga lulusan madrasah memiliki kedudukan yang sama dengan lulusan sekolah umum dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja.⁷⁵ Hal ini menjadi langkah besar menuju integrasi sistem pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional, yang sebelumnya berjalan secara terpisah antara pendidikan agama dan pendidikan umum.⁷⁶

Dampak positif dari kebijakan ini sangat signifikan. Pertama, SKB 3 Menteri memberi pengakuan formal terhadap madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, bukan sekedar lembaga keagamaan tradisional. Kedua, madrasah mulai menerapkan kurikulum yang menggabungkan pelajaran umum dan pelajaran agama, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik umum tanpa meninggalkan dasar keagamaannya⁷⁷. Ketiga, mobilitas sosial dan akademik lulusan madrasah meningkat, karena mereka dapat melanjutkan studi ke sekolah atau perguruan tinggi umum tanpa hambatan administratif.⁷⁸

Namun, disisi lain SKB 3 Menteri juga membawa sejumlah tantangan.

⁷⁵ Lalu Ramdan Hadi, *Pengaruh SKB 3 Menteri Terhadap Pendidikan Formal di Indonesia*, (Lombok: 2015), 64.

⁷⁶ Ahmad Rahman, "Integrasi Pendidikan Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional", *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 9 No. 1, (2022), 44-46.

⁷⁷ Rahman, "Integrasi Pendidikan Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional", 47-48.

⁷⁸ Hadi, *Pengaruh SKB 3 Menteri Terhadap Pendidikan Formal di Indonesia*, 3.

Madrasah harus menyesuaikan diri dengan beban kurikulum baru yang lebih padat dan menuntut kemampuan guru dalam mengajarkan mata pelajaran umum. Banyak madrasah di masa awal kebijakan ini belum memiliki sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai, sehingga implementasi kebijakan berjalan lambat.⁷⁹Selain itu terdapat kekhawatiran bahwa dengan semakin banyaknya pelajaran umum, muatan keagamaan di madrasah akan berkurang, dan hal ini berpotensi menggeser identitas keislaman madrasah.⁸⁰

Secara keseluruhan, SKB 3 Menteri tahun 1975 telah memberi arah baru bagi pendidikan Islam di Indonesia dengan menempatkan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki posisi sejajar dengan sekolah umum. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini memerlukan perhatian serius agar keseimbangan antara pendidikan agama dan umum tetap terjaga serta tidak mengikis ciri khas madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam.⁸¹

2.2.5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren merupakan regulasi penting yang memberikan kedudukan hukum bagi pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Sebelum undang-undang ini diterbitkan, pesantren hanya di atur secara tidak langsung melalui kebijakan mengenai madrasah, terutama melalui SKB 3 Menteri Tahun 1975 yang berfokus pada pengakuan kurikulum dan

⁷⁹ Rahman, "Integrasi Pendidikan Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional", 49.

⁸⁰Abdul Latif, "Madrasah dan Tantangan Dualisme Pendidikan Islam", *Jurnal Qolamuna*, Vol. 7 No. 2, (2021), 115.

⁸¹ Latif, "Madrasah dan Tantangan Dualisme Pendidikan Islam", 117.

ijazah madrasah dan pesantren yang telah menggunakan sistem madrasah atau telah menyelenggarakan pendidikan formal.⁸² Hal ini menyebabkan pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal seperti pesantren salaf yang hanya mengajarkan kitab kuning tidak memperoleh pengakuan administratif dan tidak mendapatkan dukungan pembiayaan dari negara. Oleh karena itu, UU No. 18 Tahun 2019 hadir untuk menegaskan bahwa seluruh pesantren baik yang berbasis pendidikan formal maupun nonformal, memiliki kedudukan yang sah dalam sistem pendidikan nasional dengan tetap mempertahankan kekhasannya sebagai lembaga yang dibangun atas nilai keilmuan Islam dan tradisi kepesantrenan.⁸³

Undang-undang ini mengatur bahwa penyelenggaraan pendidikan pesantren mencakup pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan diniyah, serta memberikan hak kepada santri untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan ijazah sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.⁸⁴ Selain itu, undang-undang ini menempatkan pesantren sebagai lembaga yang memiliki fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Di sisi pembiayaan, undang-undang ini mengamanatkan bahwa pesantren berhak memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber lain yang sah, sehingga beban biaya tidak sepenuhnya ditanggung oleh pesantren sebagaimana terjadi pada masa sebelum

⁸² Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 112.

⁸³ Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, 55.

⁸⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Bab IV-V.

regulasi ini diterbitkan. Dengan demikian, UU No. 18 Tahun 2019 tidak hanya memperkuat legitimasi pesantren dalam dunia pendidikan, tetapi juga mengakui peran strategis pesantren dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.⁸⁵

2.3 Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia

2.3.1 Lembaga Pendidikan Islam Informal

Pendidikan Islam informal berlangsung di lingkungan keluarga dan masyarakat tanpa struktur lembaga yang resmi. Keluarga berperan sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama yang menanamkan nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang. Selain itu, lingkungan sosial seperti masjid dan surau juga menjadi tempat belajar informal bagi masyarakat dalam memperkuat spiritualitas.⁸⁶

2.3.2 Lembaga Pendidikan Islam Non-Formal

Lembaga pendidikan Islam Non-Formal merupakan pendidikan yang dilakukan di luar jalur formal, tetapi terorganisasi secara terstruktur dan memiliki tujuan yang jelas. Lembaga ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan keagamaan di luar sekolah formal.

1. Madrasah Diniyah

Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan non-formal yang mengajarkan

⁸⁵ Direktorat pendidikan Diniyah dan Pesantren, *Naskah Akademik Undang-Undang Pesantren* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 78.

⁸⁶ S Khairani dkk, "Lembaga Pendidikan Sekolah dan Madrasah di Indonesia: Pembaharuan Metode dan sistemnya", *TABYIN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 2 (2019), 40-41.

dasar-dasar ilmu agama seperti fikih, tauhid, akhlak, dan baca tulis Al-Qur'an. Madrasah ini biasanya diikuti oleh anak-anak yang bersekolah di sekolah umum untuk memperkuat pendidikan agamanya.⁸⁷

2. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ/TPA)

TPQ atau TPA merupakan lembaga pendidikan Islam non-formal yang mengajarkan baca tulis Al-Qur'an, hafalan surat-surat pendek, dan doa harian. Lembaga ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan menjadi wadah pembentukan karakter Islami sejak usia dini.⁸⁸

3. Majelis Taklim

Majelis taklim merupakan forum pengajian yang diselenggarakan oleh masyarakat secara rutin untuk memperdalam pemahaman agama. Lembaga ini fleksibel dan biasanya diikuti oleh masyarakat umum, terutama ibu rumah tangga dan remaja⁸⁹

2.3.3 Lembaga Pendidikan Islam Formal

1. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) mencakup Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI). Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau PTKI ini berfungsi mencetak tenaga

⁸⁷ Ismail Bafadhol, "Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia", *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, No. 11, (2017), 52-54.

⁸⁸ R. A. Junaidi dkk, "Lembaga Pendidikan Pesantren di Indonesia", *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan keislaman*, (2022), 20-21.

⁸⁹ Bafadhol, "Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia", 55-56.

ahli di bidang agama sekaligus intelektual Muslim yang menguasai ilmu pengetahuan modern. Dengan prinsip integrasi antara iman dan ilmu, PTKI berperan strategis dalam mencetak sumber daya manusia Muslim yang berwawasan luas dan moderat.⁹⁰

2. Madrasah

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam Formal yang memiliki jenjang setara dengan sekolah umum, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsaniwiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Keberadaan madrasah merupakan wujud integrasi pendidikan umum dan kegamaan yang bertujuan membentuk peserta didik yang berilmu dan beriman. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan posisi madrasah sejajar dengan sekolah umum di bawah pengawasan Kementerian Agama.⁹¹

3. Pesantren

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki akar sejarah panjang dan peran penting dalam penyebaran Islam.⁹² Istilah “pesantren” berasal dari kata *santri* yang berarti murid, dan awalan *pe* serta akhiran *an* yang berarti tempat tinggal para santri.⁹³ Dalam konteks historis, pesantren berfungsi bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat dakwah, pembinaan social, dan pelatihan kader umat⁹⁴

Ciri khas pesantren terletak pada keberadaan kiai sebagai tokoh sentral, santri

⁹⁰ M. F Abid dan Naffa’aini, “Sejarah Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 3 No. 1, (2025), 22-25.

⁹¹ Khairani dkk, “Lembaga Pendidikan Sekolah dan Madrasah di Indonesia”, 36.

⁹² Junaidi dkk, “Lembaga Pendidikan Pesantren di Indonesia”, 12.

⁹³ Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, 45.

⁹⁴Bafadhol, “Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia”, 46.

sebagai peserta didik, masjid sebagai pusat kegiatan belajar, serta asrama (pondok) sebagai tempat tinggal santri.⁹⁵ Materi pelajaran utama di pesantren tradisional meliputi ilmu-ilmu keagamaan klasik seperti fikih, tafsir, hadits, tauhid, dan tasawuf yang diajarkan menggunakan kitab kuning (kitab berbahasa Arab klasik).⁹⁶ Metode pengajaran yang digunakan umumnya berupa *bandongan* (ceramah kiai diikuti santri secara kolektif) dan *sorogan* (santri membaca kitab di hadapan kiai untuk dikoreksi)⁹⁷

Dalam perkembangannya, pesantren terbagi menjadi dua corak utama, yaitu pesantren tradisional (salafiyah) dan pesantren modern (khalafiyah). Pesantren salafiyah lebih menekankan pada pengajaran kitab klasik dan nilai-nilai moral keislaman, sedangkan pesantren khalafiyah telah mengadopsi sistem pendidikan modern dengan memasukkan pelajaran umum dan ilmu pengetahuan kontemporer dalam kurikulumnya.⁹⁸ Selain perbedaan berdasarkan sistem pendidikan, secara kultural terdapat pula perbedaan ideologis dan organisatoris antara pesantren yang berafiliasi pada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia.⁹⁹

a) Pesantren Nahdlatul Ulama (NU)

Pesantren yang berafiliasi pada Nahdlatul Ulama dikenal dengan corak

⁹⁵ Junaidi dkk, "Lembaga Pendidikan Pesantren di Indonesia", 14.

⁹⁶ Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), 22.

⁹⁷ Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, 78.

⁹⁸ Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, 48.

⁹⁹ Abid dan Naffa'aini, "Sejarah Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia", 22.

tradisionalis.¹⁰⁰ Pesantren NU mempertahankan penggunaan kitab kuning sebagai sumber utama ajarannya dan menjadikan *ahlusunnah wal jama'ah* (aswaja) sebagai dasar teologi dan manhaj berpikir.¹⁰¹ Pendekatan pendidikan di pesantren NU menekankan adab terhadap guru (ta'dhim kepada kiai), penguasaan ilmu alat (nahwu, Sharaf, balaghah), serta konsistensi dalam tradisi keilmuan klasik, seperti pembacaan *tahlilan, manakiban, dan haul*.¹⁰² Contoh pesantren besar yang berafiliasi dengan NU antara lain Pondok Pesantren Tubeireng Jombang, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dan Pondok Pesantren Langitan Tuban.¹⁰³

b) Pesantren Muhammadiyah

Salah satu perkembangan menarik dalam sejarah pendidikan Islam adalah keputusan Muhammadiyah untuk mendirikan pondok pesantren, meskipun pada awal berdirinya organisasi ini justru berusaha mengganti sistem pesantren tradisional dengan model pendidikan modern. Ketika Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912 tidak menempatkan pesantren sebagai model pendidikan utama. Muhammadiyah lebih memilih mengembangkan sistem pendidikan modern melalui pendirian sekolah-sekolah formal yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, karena dianggap lebih relevan dengan kebutuhan kemajuan umat pada masa itu.¹⁰⁴

Hal ini menjadi sangat menarik, mengingat para ulama dan tokoh

¹⁰⁰ Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, 81.

¹⁰¹ A. Musthofa Bisri, *Aswaja dan Keindonesiaan* (Yogyakarta: LKiS, 2016), 56.

¹⁰² M. Amin Abdullah, *Islam dan Paradigma Ilmu Integratif* (Yogyakarta: Suka Press, 2007), 102.

¹⁰³ Junaidi dkk, "Lembaga Pendidikan Pesantren di Indonesia", 18.

¹⁰⁴ Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi Menuju Milenium Baru*, 42.

Muhammadiyah di Sulawesi Selatan pada tahun 1971 mengambil keputusan strategis untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan berbasis pesantren, yaitu Pondok Pesantren Muhammadiyah Gombara, yang merupakan pesantren Muhammadiyah pertama di wilayah Indonesia Timur pasca tahun 1960-an. Keputusan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi dan pemikiran dalam tubuh Muhammadiyah, khususnya terkait dengan model pendidikan Islam yang sebelumnya lebih dikenal melalui sistem sekolah modern dan madrasah. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengapa Muhammadiyah akhirnya memutuskan untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam dalam bentuk pesantren yang akan dibahas lebih mendalam pada bab selanjutnya.¹⁰⁵

Perbedaan antara pesantren yang berkembang dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dapat dilihat dari orientasi pendidikan, metode pembelajaran, serta pendekatan keagamaan yang digunakan. Pesantren yang berafiliasi dengan NU umumnya mempertahankan sistem pendidikan pesantren tradisional dengan penekanan pada penguasaan kitab kuning serta penggunaan metode pembelajaran klasik seperti sorogan dan bandongan.¹⁰⁶ Sistem ini menempatkan kiai sebagai figur sentral dalam proses transmisi ilmu dan pembentukan karakter santri. Sementara itu, pesantren yang berada dalam lingkungan Muhammadiyah cenderung mengembangkan sistem pendidikan yang lebih modern dengan mengintegrasikan ilmu

¹⁰⁵ Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi Menuju Milenium Baru*, 43.

¹⁰⁶ Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, 55–60.

agama dan ilmu umum dalam kurikulum yang terstruktur.¹⁰⁷ Model pendidikan Muhammadiyah juga lebih menekankan pada pengelolaan lembaga secara modern, penggunaan metode pembelajaran yang sistematis, serta orientasi pada pembentukan intelektual Muslim yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua tradisi pendidikan Islam ini memiliki pendekatan yang berbeda, namun sama-sama berkontribusi penting dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986), 94–96.

¹⁰⁸ Nur Wulandari Sunawir dan Amril M., “Perbedaan Kebijakan Pendidikan Pesantren Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah,” *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, Vol. 4 No. 2 (2025), 204–215.